

Judul : Sistem pertanahan, digitalisasi tutup celah mafia tanah
Tanggal : Minggu, 15 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Sistem Pertanahan Digitalisasi Tutup Celah Mafia Tanah

ANGGOTA Komisi II DPR Mardani Ali Sera mendukung pengawasan ketat terhadap kebijakan digitalisasi pertanahan sebagai langkah strategis menutup ruang gerak mafia tanah. Digitalisasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan hak masyarakat secara lebih terukur, sistematis, dan transparan.

Mardani mengatakan, transformasi layanan pertanahan menuju sistem elektronik bukan sekadar perubahan teknis. Peralihan dari sertipikat fisik ke sertipikat digital menyentuh aspek budaya birokrasi dan kebiasaan masyarakat yang tidak mudah diubah.

"Satu isu yang mengemuka adalah perpindahan dari sertipikat fisik jadi sertipikat elektronik. Sederhana kelihatannya, tapi ini masalah budaya," ujar Mardani dalam keterangannya, Jumat (13/2/2026).

Secara konseptual, lanjut Mardani, sertipikat elektronik memiliki tingkat keamanan jauh lebih tinggi dibandingkan dokumen cetak. Sistem pengamanan digital, termasuk teknologi blockchain, membuat data kepemilikan tanah lebih terlindungi dari manipulasi.

"Kalau yang print out kan bisa lebih mudah dipalsukan. Dengan sistem elektronik, jejak digitalnya jelas dan tidak mudah dipalsukan," jelasnya.

DPR juga menyoroti kesiapan Pemerintah Pusat, ATR/BPN, serta Pemda dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tanpa edukasi yang memadai, digitalisasi berisiko memunculkan resistensi di tingkat akar rumput. Karena dari temuan

di lapangan, ada tiga respons utama masyarakat terhadap sertipikat elektronik.

Pertama, lanjut Mardani, kelompok yang menerima dan percaya, terutama kalangan terdidik. Kedua, kelompok yang menerima namun tetap menginginkan bukti cetak. Ketiga, kelompok yang masih menolak karena kekhawatiran. Karena itu, sosialisasi dan edukasi harus terus dilakukan hingga masyarakat menerima. Untuk yang menolak, jangan sampai ada paksaan.

Dengan sistem elektronik, sambungnya, masyarakat tidak lagi harus bolak-balik ke kantor pertanahan. Proses layanan jadi lebih cepat, terukur, dan terdokumentasi secara digital. Pada saat yang sama, ruang bagi praktik percaloan dan pungutan liar dapat ditekan secara signifikan.

Mardani menilai, jika dijalankan secara konsisten dan terintegrasi, digitalisasi pertanahan tidak hanya menjadi simbol modernisasi layanan publik. Sistem ini juga berfungsi sebagai instrumen konkret untuk melindungi hak rakyat dari praktik mafia tanah yang selama ini merugikan masyarakat.

"Kalau sistemnya kuat, transparan, dan diawasi dengan baik, ruang bermain mafia tanah akan semakin sempit," tegas politikus PKS itu.

Senada, Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi juga menekankan pentingnya sosialisasi masif dalam implementasi sertipikat elektronik. Pasalnya, tanpa pemahaman yang cukup, masyarakat justru berpotensi terbebani biaya tinggi akibat perantara dan praktik yang tidak transparan. ■ TIF